



OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENDATAAN INDEKS DESA

OLEH:
MOHAMMAD NOVAL, ST.

DIREKTUR PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DESA,
DATA DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2025**

ASTACITA, PHTC DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH

8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

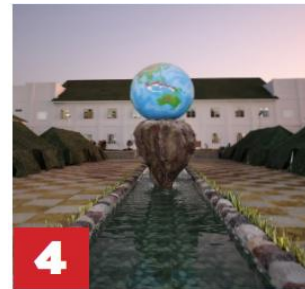
- 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3** Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5** Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

8 Program Hasil Terbaik Cepat



3

Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional



4

Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi



5

Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut



7

Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

17 Program Prioritas



1

Mencapai swasembada pangan, energi, dan air



4

Pencegahan dan pemberantasan korupsi



5

Pemberantasan kemiskinan



8

Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi



12

Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani



13

Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan



14

Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota



17

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga



Provinsi

Kab/Kota

Kecamatan

Kelurahan

Desa

(Ditetapkan 9 November 2022)

TANTANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (1)



**KETERBATASAN
SUMBER DAYA**



**KETERBATASAN
INFRASTRUKTUR**



**PARTISIPASI
MASYARAKAT**



**PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA**



**PENGEMBANGAN
SDM**



**PENGELOLAAN
KONFLIK**



**PERUBAHAN IKLIM
DAN BENCANA ALAM**



**TEKNOLOGI DAN
AKSES INFORMASI**



OTONOMI DESA



**PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN**



Sektor	Jumlah Responden
Pemdes	187
Pemerintah	108
Utilitas	103
Perbankan	65

SUMBER: ICW DALAM KOMPAS.COM (2024)

Ilustrasi Kades dan Sekdes di Kubu Raya korupsi Rp 800 juta



Indeks tunggal untuk mengukur
capaian kemajuan dan
pembangunan Desa berdasarkan
6 (enam) dimensi pengukuran.

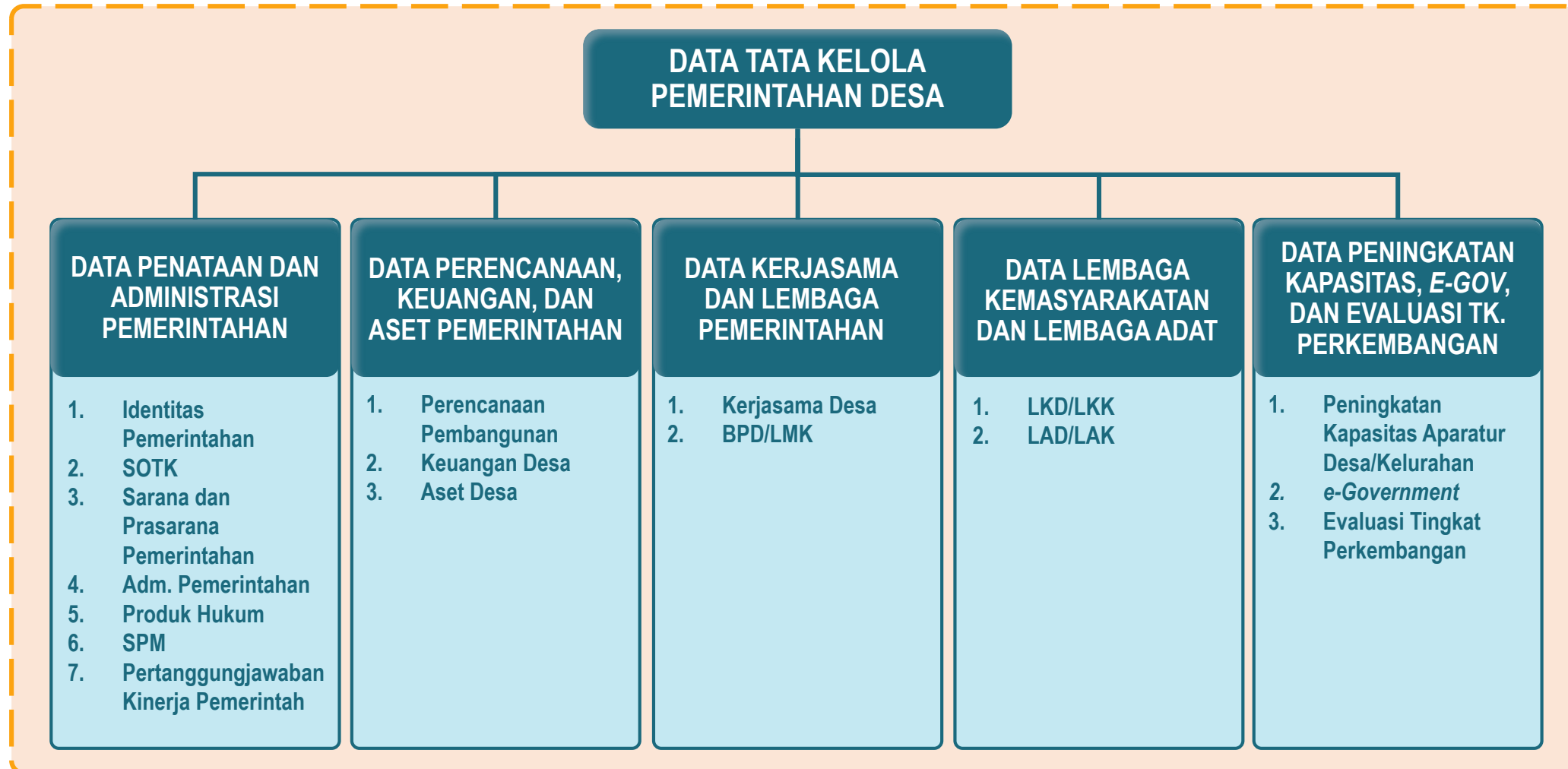
KOMITMEN DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI INDEKS DESA (1)



Kebutuhan penyesuaian struktur Data dalam mendukung Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa pada Indeks Desa.

KOMITMEN DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI INDEKS DESA (2)

Rancangan Restrukturisasi Data Tata Kelola Pemerintahan Desa



OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH S.D. DESA DALAM PENDATAAN INDEKS DESA



PROVINSI



Peningkatan Koordinasi Antar Sektor yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendataan Indeks Desa.



Peningkatan pemahaman terkait penerapan substansi dan teknis pendataan Indeks Desa.



Melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap implementasi pendataan Indeks Desa.



Pemetaan Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pendataan Indeks Desa, Serta Perumusan Alternatif Solusi.



Melakukan kajian, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Indeks Desa secara berkelanjutan.

DESA



Penyiapan dukungan data sesuai dengan kebutuhan pendataan Indeks Desa.



Pemanfaatan data Indeks Desa sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan Desa.



TERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2025